

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional. Total laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi (km^2), yang terdiri dari 2,3 juta km^2 perairan kepulauan, 0,8 juta km^2 perairan teritorial, dan 2,7 juta km^2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Posisi dan letak kepulauan Indonesia bersifat *archipelagic* karena terdiri dari 17.504 pulau. Dengan total luas laut dan posisinya tersebut menjadikan Indonesia sangat positif dalam sistem perdagangan dan penyedia bahan baku hasil perikanan laut bagi masyarakat nasional dan internasional (Apidar, Karim, dan Suhana, 2011).

Luasnya lautan Indonesia membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia karena sumber daya alam yang terkandung di lautan sangat melimpah sehingga seharusnya secara optimal dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Apabila dilihat dari potensi laut Indonesia yang ada, seharusnya pengelola kekayaan laut Indonesia dari nelayan hingga pedagang eceran ikan atau produk olahannya memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Kenyataan yang terjadi adalah pada umumnya masyarakat pesisir memiliki kesejahteraan yang rendah. Hal tersebut

menimbulkan ironi karena di negeri dengan kekayaan laut yang melimpah namun tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir pelaku usaha dibidang perikanan.

Kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, apabila orang diklasifikasikan miskin maka sudah dapat dipastikan orang tersebut belum sejahtera. Menurut Bappenas (2007), kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat.

Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas, lebih dari sekedar rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang yang diukur dari standar kesejahteraan, seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan.

Akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek diluar pendapatan (non-income factors) seperti akses kebutuhan minimum, kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi.

Angka kemiskinan Indonesia cukup tinggi. Menurut BPS (2013), tahun 2013 persentase angka kemiskinan Indonesia sebesar 11,47%. Menurut *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia (2013), sampai dengan September 2012 lalu menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin pesisir Indonesia masih mencapai 7,87 juta jiwa atau 27,24% dari total penduduk miskin Indonesia yang berjumlah 28,59 juta jiwa. Persentase kemiskinan di Indonesia pada 10 provinsi di Pulau Sumatera disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentase penduduk miskin pada 10 provinsi di Pulau Sumatera 2011 – 2013

No.	Provinsi	Tahun (%)		
		2011	2012	2013
1	Aceh	19.57	18.58	17.72
2	Sumatera Utara	11.33	10.41	10.39
3	Sumatera Barat	9.04	8.00	7.56
4	Riau	8.47	8.05	8.42
5	Kepulauan Riau	7.40	6.83	6.35
6	Jambi	8.65	8.28	8.42
7	Sumatera Selatan	14.24	13.48	14.06
8	Kepulauan Bangka Belitung	5.75	5.37	5.25
9	Bengkulu	17.50	17.51	17.75
10	Lampung	16.93	15.65	14.39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Tabel 1 menunjukkan persentase penduduk miskin pada 10 provinsi di Pulau Sumatera dari 2011 hingga 2013. Persentase kemiskinan tertinggi tahun 2013 adalah Provinsi Aceh dengan nilai persentase 17,72%. Tahun 2013 Provinsi Lampung menduduki tingkat kemiskinan nomor tiga setelah Aceh dan Bengkulu dengan persentase kemiskinan sebesar 14,39%. Dari tahun 2011 hingga tahun 2013 persentase kemiskinan Provinsi Lampung menurun.

Provinsi Lampung meliputi area daratan seluas 35.288,35 km² termasuk pulau-pulau yang terletak di bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera. Secara geografis, disebelah utara Provinsi Lampung dibatasi oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di sebelah selatan Provinsi Lampung dibatasi oleh Selat Sunda, di sebelah timur Provinsi Lampung dibatasi oleh Laut Jawa, dan di sebelah utara Provinsi Lampung dibatasi oleh Samudera Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2012). Panjang garis pantai Provinsi Lampung adalah sepanjang 1.105 km (PUMP KKP, 2011). Apabila

dilihat dari panjang garis pantai serta letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Samudera Indonesia, Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam pemanfaatan perairan laut. Provinsi Lampung juga memiliki empat Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yaitu di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Bandar Lampung. Sumber daya kelautan sangat erat hubungannya dengan masyarakat pesisir yang sebagian besar mata berpencaharian sebagai nelayan.

Masyarakat nelayan terdiri dari nelayan, buruh nelayan dan pedagang ikan (baik skala kecil dan skala besar). Masyarakat nelayan umumnya merupakan masyarakat tradisional dengan strata sosial ekonomi yang rendah. Pendidikan yang dimiliki secara umum lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat non pesisir. Masyarakat pesisir khususnya pedagang ikan dikategorikan sebagai masyarakat yang sudah biasa bergelut dengan masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Permasalahan pokok pada masyarakat nelayan jika dilihat dari segi ekonomi formal adalah masih rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan tentang kelautan, kepemilikan modal, serta manajemen usaha perikanan. Apabila dilihat dari segi ekonomi substantif, masyarakat pesisir cenderung memiliki ciri khas dan budaya ekonomi dari wilayah mereka masing-masing (Karyani, 2012).

Menyadari persentase pendapatan penduduk yang tergolong belum sejahtera di beberapa wilayah Indonesia cukup besar, pemerintah melakukan upaya

penanggulangan kemiskinan. Menurut Bappenas (2007), pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan tiga klaster. Klaster I merupakan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, klaster II merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan klaster III merupakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Salah satu program yang digagas oleh pemerintah penanggulangan kemiskinan pada klaster II adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

PNPM-Mandiri digagas mulai 2006 dan terus dilakukan pengembangan oleh pemerintah. Sejak 2008, dikembangkan PNPM yang bersifat sektoral atau yang sudah terfokus pada sektor tertentu, yaitu PNPM-PUAP (Program Usaha Agribisnis Perdesaan) yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, PNPM-KP (Kelautan dan Perikanan) yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, PNPM-Pariwisata yang dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan PNPM-Permukiman yang dikelola oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013).

Sesuai dengan pembagian sektor kerja yang dilakukan pemerintah, untuk menangani masalah kemiskinan dibidang kelautan dan perikanan menggunakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-Mandiri KP). PNPM-Mandiri KP dibagi menjadi tiga program yang lebih fokus yaitu Pengembangan Usaha Mina

Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR); serta Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Target kelompok penerima bantuan PNPM-Mandiri KP di Indonesia adalah sebanyak 4.200 kelompok dan Target kelompok penerima bantuan PNPM-Mandiri KP di Provinsi Lampung sebanyak 124 kelompok.

Pada penelitian ini, dari ketiga PNPM-Mandiri KP tersebut difokuskan kepada penerima program PUMP pada bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Bantuan dana Program PUMP yang disalurkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung ini digunakan sebagai kredit modal kerja bagi nelayan untuk meningkatkan produktivitas nelayan penerima bantuan. Besarnya bantuan yang diberikan pada setiap kelompok pengolah dan pemasar bidang perikanan adalah sebesar Rp 50.000.000,00. Data jumlah kelompok pengolah dan pemasar disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah kelompok pengolah dan pemasar penerima manfaat program PUMP bidang P2HP Provinsi Lampung tahun 2013

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Penerima program PUMP (kelompok)
1.	Bandar Lampung	4
2.	Lampung Selatan	6
3.	Pringsewu	5
4.	Tulang Bawang	9
5.	Tanggamus	5
6.	Pesawaran	8
7.	Lampung Barat	8
TOTAL		45

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Tabel 2 menggambarkan rekapitulasi kelompok pengolah dan pemasar penerima manfaat program PUMP bidang P2HP Provinsi Lampung tahun

2013. Program PUMP bidang PPHP di Provinsi Lampung dibagi atas 6 kabupaten dan 1 kota. Ada sebanyak 4 kelompok pengolah dan pemasardi wilayah pesisir Kota Bandar Lampung yang menerima bantuan program PUMP.

Tujuan akhir dari program PUMP ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Namun demikian, untuk mengetahui aktualisasi program tersebut dilapangan perlu dilakukannya kajian. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti program PUMP dengan judul keragaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (P2HP) dan pendapatan pelaku usaha bidang perikanan di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dirumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keragaan pelaksanaan program PUMP bidang P2HP di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah pendapatan pelaku usaha dibidang perikanan penerima program sebelum dan setelah dilaksanakannya program PUMP bidang P2HP di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung?
3. Kendala apa saja yang dihadapi didalam pelaksanaan program PUMP bidang P2HP di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Keragaan pelaksanaan program PUMP bidang P2HP di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung.
2. Pendapatan pelaku usaha dibidang perikanan penerima program sebelum dan setelah dilaksanakannya program PUMP pada bidang P2HP di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung.
3. Kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan program PUMP bidang P2HP di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung.

C. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri PL dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan program PNPM Mandiri PL.
2. Informasi bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam pemanfaatan program PNPM Mandiri PL untuk meningkatkan pendapatannya.
3. Bahan studi, rujukan, dan pertimbangan dalam penelitian sejenis.